

Evaluasi Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan pengembangan Dalam Pemantauan Pembangunan Dan Pengembangan Kabupaten Di Provinsi Riau

* **Andika Perdana Rihaz¹, Sylvina Rusadi²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : andikaperdanarihaz@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) dalam pemantauan pembangunan dan pengembangan kabupaten di Provinsi Riau. Fokus evaluasi mencakup pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Bappedalitbang masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya pengawasan, koordinasi yang belum optimal, dan terbatasnya sumber daya. Meskipun tingkat capaian kerja cukup tinggi secara kuantitatif, masih terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya rendah, sehingga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peran strategis Bappedalitbang dan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Kata Kunci: Evaluasi, Bappedalitbang, Pembangunan Daerah, Pemantauan, Riau.

Abstract

This study aims to evaluate the performance of the Regional Development Planning, Research, and Development Agency (Bappedalitbang) in monitoring the development and progress of regencies in Riau Province. The evaluation focuses on the implementation of coordination, facilitation, and monitoring activities related to regional development programs. The research uses a qualitative method with data collected through in-depth interviews and documentation. The findings reveal that the agency faces several challenges, including insufficient supervision, suboptimal coordination, and limited resources. Although the overall performance level is quantitatively high, several activities show low budget realization, affecting task effectiveness and efficiency. This research contributes to understanding the strategic role of Bappedalitbang and emphasizes the importance of continuous evaluation to improve regional development performance.

Keywords: Evaluation, Bappedalitbang, Regional Development, Monitoring, Riau.

PENDAHULUAN

Untuk memaksimalkan kinerja pemerintah tersebut maka dibentuklah pembagian tugas pemerintah yang terbagi menjadi Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi, Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten atau kota dan yang terkecil adalah pemerintahan desa. Pembagian tugas pemerintah tersebut awalnya dilegalkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah namun seiring perkembangan zaman undang-undang ini dilakukan revisi demi menyempurnakan maksud dan tujuannya sehingga Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa:

“Pengertian otonomi Daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Maka dengan begitu tentunya di masing-masing pemerintahan daerah memiliki strategi masing-masing dalam memberikan pelayanan dan menjalankan sistem pemerintahannya. Namun dengan adanya kebebasan tersebut juga pemerintahan daerah tidak bisa melaksanakan sistem pemerintahan yang semena-mena karena pelaksanaan sistem pemerintahan tersebut juga harus melihat hierarki sistem pemerintahan dan hierarki perundang-undangan di Indonesia yang mana sistem pemerintahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sistem pemerintahan dan Undang-Undang yang lebih tinggi.

Bappedalitbang adalah kepanjangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dimana pada kantor tersebut tentu saja memiliki banyak tugas dan fungsinya yang terutama adalah fungsi perencanaan pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan di setiap daerah merupakan gambaran keberhasilan dan kemakmuran daerah tersebut semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka orang akan menganggap daerah tersebut semakin maju dan semakin berkembang. Maka dengan demikian untuk menciptakan suatu pembangunan daerah yang baik maka tentunya dibutuhkan tenaga-tenaga yang profesional dibidangnya sehingga pengoptimalan pembangunan di daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemukan di lapangan berdasarkan data-data yang ada dengan masalah dalam Evaluasi Tugas Pemantauan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten di Provinsi Riau.

Menurut (Moleong, 2016: 79) mengemukakan bahwa kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang termasuk ke dalam penelitian yang akan mengamati tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian baik itu dari segi perilaku, pandangan, perbuatan ataupun hal-hal lain yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan dengan cara perbandingan kata, bahasa atau konteks keilmuan tertentu (Moleong, 2001: 6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi adalah suatu cara atau proses yang terjadi untuk melihat suatu sistem kebijakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan tertentu yang melakukan

membuat rumusan masalah pada suatu kebijakan, melakukan implementasi kebijakan, dan melakukan Pemantauan atau juga biasa disebut pengawasan terhadap implementasi suatu kebijakan yang telah ditetapkan (Dunn, 2013).

Bappedalitbang Provinsi Riau ini dikarenakan Bappedalitbang adalah kepanjangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dimana pada kantor tersebut tentu saja memiliki banyak tugas dan fungsinya yang terutama adalah fungsi perencanaan Pembangunan. Penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Dalam Pemantauan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten di Provinsi Riau yang akan di analisa berdasarkan 6 elemen menurut Menurut William N. Dunn 2003 yaitu: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas dan Ketepatan.

1. Efektifitas

Menurut William N. Dunn (2005:498), efektivitas merupakan suatu kriteria dalam memilih berbagai alternatif yang akan dijadikan rekomendasi, dengan dasar pertimbangan sejauh mana alternatif tersebut mampu menghasilkan dampak atau hasil yang optimal, tanpa memperhatikan aspek efisiensi. Efektivitas dalam evaluasi kebijakan merujuk pada tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta kesesuaian antara hasil dan dampak yang diperoleh dengan harapan awal, dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan. William N. Dunn juga menegaskan pentingnya memperhitungkan berbagai aspek dalam menilai efektivitas, termasuk dampak yang tidak diantisipasi—baik positif maupun negatif—serta kemungkinan adanya opsi kebijakan lain yang lebih optimal.

a) Kualitas Kinerja Bappedalitbang Khususnya Pada Pemantauan Perencanaan Pembangunan

Menurut Mangkunegara (2009:32), kinerja merupakan hasil kerja seorang pegawai yang dapat diukur baik secara kualitas maupun kuantitas, yang dicapai melalui kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan oleh atasan. Selain itu, kinerja juga dapat dimaknai sebagai pencapaian hasil dari usaha individu yang dilakukan berdasarkan kemampuan dan tindakan tertentu dalam suatu kondisi tertentu.

Sementara itu, menurut Siagian (2008:21), kinerja mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi yang merupakan bagian dari implementasi visi, misi, dan strategi organisasi, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Kinerja juga menjadi indikator untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam kualitas kinerja bappedalitbang diketahui bahwa kualitas kinerja bappedalitbang pada pengawasan Pembangunan sudah baik, hal ini dapat diketahui dari pengawasan yang dilakukan setiap tiga bulan sehingga bappedalitbang dapat terus memperbaiki hal hal yang kurang dari rencana yang telah dilakukan.

b) Kualitas Kinerja Bappedalitbang Dalam Melakukan Penelitian Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Daerah

Menurut Mangkunegara (2009:32), kinerja merupakan hasil kerja seorang pegawai yang dapat diukur baik secara kualitas maupun kuantitas, yang dicapai melalui kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan oleh atasan. Selain itu, kinerja juga dapat dimaknai sebagai pencapaian hasil dari usaha individu yang dilakukan berdasarkan kemampuan dan tindakan tertentu dalam suatu kondisi tertentu.

Sementara itu, menurut Siagian (2008:21), kinerja mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi yang merupakan bagian

dari implementasi visi, misi, dan strategi organisasi, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Kinerja juga menjadi indikator untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Diketahui bahwa kualitas kinerja bapedalitbang dalam penelitian perencanaan Pembangunan masih belum berjalan secara merata, dikarekan masih terlihat dengan jelas perbedaan perkembangan antara kota pekanbaru dengan daerah lainnya, juga masih banyak inovasi dari bapedalitbang yang tidak dapat di implementasikan.

2. Efisiensi

Menurut Stoner (2010), efisiensi merujuk pada kemampuan untuk mengurangi penggunaan sumber daya seminimal mungkin guna mencapai tujuan organisasi. Individu yang bekerja secara efisien mampu menekan biaya penggunaan sumber daya. Efisiensi kerja berarti menjalankan aktivitas dengan cara yang paling sederhana, biaya paling rendah, waktu paling singkat, beban paling ringan, dan jarak paling pendek untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan suatu proses berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk memperoleh hasil. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk hasil tertentu, maka proses tersebut semakin efisien.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi diartikan sebagai ketepatan dalam cara melakukan sesuatu, serta kemampuan menyelesaikan tugas dengan benar dan akurat tanpa membuang banyak waktu, tenaga, dan biaya. Menurut Syam (2020), efisiensi merupakan indikator keberhasilan yang dinilai dari seberapa besar sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu. Sebuah kegiatan dapat dianggap efisien apabila ada peningkatan dalam proses, seperti menjadi lebih cepat atau lebih hemat. Sementara itu, Susilo (2011) menjelaskan bahwa efisiensi adalah suatu kondisi di mana pekerjaan diselesaikan dengan benar dan sepenuhnya mengandalkan kemampuan yang dimiliki.

a) Kualitas Pembangunan Di Provinsi Riau

Menurut Agus Suryono (2001:62), pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan yang bertujuan menempatkan manusia secara proporsional sebagai pelaku (subjek) sekaligus penerima manfaat (objek) pembangunan. Melalui proses ini, manusia diharapkan mampu mengembangkan serta memberdayakan dirinya, sehingga dapat menjalin hubungan yang harmonis secara internal dan menciptakan keseimbangan secara eksternal.

Sementara itu, menurut Ananda dalam Suhandoyo (2002:182), pembangunan di masa lampau seringkali hanya difokuskan pada aspek pertumbuhan (growth). Padahal, pertumbuhan seharusnya dipandang sebagai indikator pembangunan, bukan sebagai tujuan utama. Tujuan sejati dari pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Indikator-indikator pembangunan antara lain partisipasi masyarakat, keadilan sosial, kesempatan kerja bagi semua, dan kemandirian.

Dapat diketahui bahwa kualitas Pembangunan di provinsi riau sudah baik, dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya ekomoni daerah ini merupakan hal yang baik, namun dalam aspek infrastruktur masih perlunya untuk dilakukan perencanaan lebih baik untuk meningkatkan kualitas Pembangunan infrasturktur di daerah daerah.

b) Perkembangan Pembangunan Di Provinsi Riau

Proses pembangunan menuntut terjadinya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan, baik dalam struktur ekonomi dari sektor pertanian ke industri atau jasa maupun dalam aspek kelembagaan, melalui regulasi atau reformasi institusi. Pembangunan yang dilakukan secara terencana dianggap sebagai pendekatan yang

lebih rasional dan sistematis untuk membangun masyarakat yang masih dalam tahap awal perkembangan. (Subandi, 2011: 9–11)

Beberapa pendapat ahli mengenai pembangunan antara lain disampaikan oleh Rogers (dalam Rochajat dkk., 2011:3), yang menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu perubahan yang bermanfaat menuju sistem sosial dan ekonomi yang ditentukan berdasarkan kehendak suatu bangsa. Sementara itu, menurut W.W. Rostow (dalam Abdul, 2004:89), pembangunan merupakan suatu proses yang berlangsung secara linear, dimulai dari kondisi masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dan maju.

Dalam pelaksanaan Pembangunan di provinsi diketahui bahwa masih adanya perbedaan perkembangan yang ada di provinsi riau, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang menyebabkan terhambatnya perkembangan di daerah selain kota pekanbaru.

3. Kecukupan

Menurut Winarno (2002:186), kecukupan dalam konteks kebijakan publik menunjukkan bahwa suatu tujuan dianggap telah tercapai apabila hasilnya dirasakan cukup dalam berbagai aspek. Kecukupan (adequacy) berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai-nilai, atau peluang yang muncul dari permasalahan yang ada. Dengan kata lain, kecukupan tetap berhubungan erat dengan efektivitas, karena bertujuan menilai atau memprediksi sejauh mana alternatif kebijakan mampu memberikan pemenuhan terhadap hal-hal tersebut dalam upaya menyelesaikan masalah.

Masalah-masalah yang timbul dari suatu kebijakan perlu diidentifikasi agar dapat diklasifikasikan ke dalam tipe masalah yang tepat. Oleh karena itu, sebelum suatu kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan, penting dilakukan analisis terhadap kesesuaian metode yang digunakan dengan sasaran yang ingin dicapai—apakah metode tersebut sudah tepat, sesuai aturan, dan relevan secara teknis untuk pelaksanaan di lapangan.

a) Pembangunan Di Provinsi Riau Sudah Merata Hingga Ke Ujung Provinsi

Menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014:44), meskipun istilah pembangunan belum memiliki definisi yang benar-benar disepakati seperti halnya modernisasi, secara umum pembangunan dipahami sebagai suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang berlangsung secara sadar dan terencana, yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara dalam mencapai modernitas. Pembangunan juga bertujuan mengubah pola pikir masyarakat dari yang bersifat tradisional menuju pola pikir modern. Intinya, pembangunan adalah proses yang harus dilalui oleh suatu negara dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya.

diketahui bahwa perencanaan sudah dilakukan secara terperinci namun bapedalitbang mengalami beberapa kendala dalam Pembangunan salah satunya adalah sulitnya akses ke daerah-daerah terpencil dan kewenangan pemprov tidak dapat masuk pada Pembangunan sehingga butuh Kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

b) Manfaat Pembangunan Dirasakan Oleh Seluruh Masyarakat

Pembangunan infrastruktur merupakan elemen yang sangat krusial dalam mendukung aktivitas dan dinamika ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Infrastruktur memiliki peran strategis, salah satunya adalah menciptakan peluang kerja dalam skala besar (Setiawan, 2019). Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas infrastruktur yang dimiliki. Antara pembangunan ekonomi dan perkembangan infrastruktur terdapat hubungan yang erat dan saling bergantung. Dengan kata lain, keberadaan infrastruktur menjadi syarat penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Negara yang memiliki infrastruktur yang memadai

akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan infrastruktur yang terbatas.

Diketahui bahwa manfaat Pembangunan yang dirasakan Masyarakat masih belum maksimal, hal ini dikarenakan pada bagian infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang ada di provinsi riau masih rusak dan belum di lakukan perbaikan oleh Pemprov.

4. Pemerataan

Perataan dalam kebijakan publik berkaitan dengan aspek keadilan yang diterima oleh kelompok sasaran kebijakan. Konsep kesamaan (equity) memiliki kaitan erat dengan pertimbangan rasionalitas hukum dan sosial, serta merujuk pada bagaimana dampak dan upaya dari kebijakan didistribusikan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kebijakan yang mengedepankan prinsip pemerataan adalah kebijakan yang dampak maupun upayanya dibagi secara adil. Suatu program bisa dikatakan efektif, efisien, dan memadai jika manfaat dan biayanya tersebar secara merata di antara masyarakat.

a) Pengawasan Telah Dilakukan Keseluruh Wilayah Provinsi Riau

Pengawasan merupakan proses pengamatan dan pemantauan yang dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi langsung terhadap aktivitas operasional di lapangan, analisis laporan, dan cara lainnya, yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mendeteksi adanya penyimpangan, baik yang disengaja maupun tidak, dari rencana dan program yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan dari rencana yang dilakukan, dilakukan oleh inspektorat dan BPKP pada bagian keuangan, yang mana dalam hal ini merupakan hal yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang akan di dapat dari perencanaan awal.

b) Penelitian Pembangunan Telah Dikaji Secara Keseluruhan

Penelitian kebijakan diartikan sebagai suatu proses penelitian yang dilakukan secara sistematis guna mendukung kebijakan publik atau menganalisis permasalahan sosial yang mendasar. Tujuannya adalah untuk membantu para pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dengan menyediakan rekomendasi yang bersifat praktis dan berorientasi pada tindakan nyata. Dalam konteks ini, yang menjadi fokus utama dari penelitian kebijakan bukanlah seberapa kuat nilai ilmiah dari hasil penelitiannya, melainkan sejauh mana hasil tersebut dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan sosial.

Perbaikan terhadap pengelolaan trans metro pekanbaru oleh dinas perhubungan kota pekanbaru masih belum berjalan maksimal, masih banyak fasilitas yang perlu dilakukan rehabilitasi atau perbaikan, namun hingga sekarang masih belum ada di lakukan perbaikan terutama pada halte halte yang ada saat ini.

Diketahui bahwa penelitian yang dilakukan secara menyeluruh sudah baik namun dalam implementasinya masih belum maksimal, masih banyak daerah daerah yang belum berkembang dengan baik.

5. Responsifitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat dimaknai sebagai bentuk tanggapan terhadap suatu tindakan atau kebijakan yang diterapkan. Responsivitas mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari bagaimana masyarakat merespons pelaksanaannya—baik melalui prediksi terhadap dampak kebijakan sebelum diterapkan, maupun reaksi masyarakat setelah kebijakan mulai menunjukkan hasil, yang bisa berupa dukungan ataupun penolakan.

a) Hasil Dari Pembangunan Yang Dilakukan

Hasil dalam pemerintahan merujuk pada kinerja yang dicapai oleh suatu entitas pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik dalam bentuk keluaran (output) maupun hasil (outcome). Mahmudi menekankan bahwa hasil ini perlu diukur dan dievaluasi untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masih banyak daerah yang belum mendapatkan hasil dengan maksimal dari perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh bapedalitbang.

6. Kesamaan

Dalam pandangan Miriam Budiardjo sebagaimana disampaikan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2008, konsep kesamaan dalam pemerintahan tidak dijabarkan secara eksplisit dalam satu definisi tetap. Namun, pemahamannya dapat ditelusuri melalui berbagai gagasan beliau mengenai ilmu politik dan kenegaraan. Kesamaan dalam konteks pemerintahan, menurut perspektif Budiardjo, berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, baik dalam hal akses terhadap kekuasaan, partisipasi politik, maupun perlakuan yang adil di depan hukum bagi seluruh warga negara.

Oleh karena itu, konsep kesamaan dalam pemerintahan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi merupakan prinsip penting yang harus diterapkan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, termasuk dalam sistem politik, hukum, dan struktur sosial.

a) Seluruh Wilayah Provinsi Riau Menjadi Wilayah Kerja Bapedalitbang

Wilayah kerja dalam pemerintahan mengacu pada area atau kawasan tertentu yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab serta kewenangan suatu lembaga pemerintahan atau pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, wilayah kerja adalah batas teritorial di mana sebuah institusi pemerintahan memiliki otoritas untuk melaksanakan kekuasaan atau kewenangannya. Wilayah kerja ini menentukan sejauh mana cakupan geografis suatu instansi atau pejabat pemerintah dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam batas wilayah tersebut, pelaksanaan tugas dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wilayah kerja bapedalitbang bergantung pada kewenangan pemprov riau, juga bapedalitbang masih memerlukan izin apabila ingin melakukan Pembangunan terhadap daerah daerah lainnya.

b) Seluruh Wilayah Provinsi Riau Didalam Pengawasan Bapedalitbang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang sangat berkaitan dengan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, dalam setiap organisasi—termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi—fungsi pengawasan menjadi suatu keharusan. Hal ini ditegaskan oleh Terry (2007:15), yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, perlu dijalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

Dalam pelaksanaan kerja bapedalitbang hanya melakukan perencanaan Pembangunan yang mana juga di bantu dalam bentuk pengawasan oleh inspektorat dan BPKP.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Evaluasi Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Dalam Pemantauan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten di Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik, untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan kesimpulan per indikator. Pada indikator efektifitas bapedalitbang sudah membuat jadwal tetap untuk pemantauan pelaksanaan dari rencana yang dilakukan yaitu setiap 3 bulan sekali agar selalu mendapatkan perkembangannya dengan maksimal dan agar dapat melakukan perencanaan ulang apabila ada perubahan yang terjadi.

Pada indikator efisiensi wilayah provinsi riau telah mendapatkan hasil dari rencana yang dilakukan sebelumnya yang berhasil, salah satu contohnya peningkatan ekonomi, peningkatan indek Pembangunan manusia, dan penurunan angka kemiskinan.

Pada indikator kecukupan belum berjalan baik hal ini dikarenakan masih banyaknya wilayah di provinsi riau yang masih tertinggal perkembangannya dari kota pekanbaru.

Pada indikator pemerataan bapedalitbang melakukan penelitian secara mendalam untuk perencanaan Pembangunan, hal ini untuk memastikan bahwa masalah yang adad apay diselesaikan dengan baik dan untuk memaksimalkan hasil akhir yang akan didapatkan.

Pada indikator reponsifitas hasil dari Pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat namun belum secara menyeluruh, hal ini dikarenakan masih ada wilayah provinsi riau yang tertinggal dalam perkembangannya.

Pada indikator kesamaan pelaksanaan dari perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh bapedalitbang di awasi oleh inspektorat dan BPKP hal ini untuk memaksimalkan hasil akhir yang akan di dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. J. (2016). *Metedologi penelitian kualitatif* (Vol. 2448). Kakek nenek.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Fayol, H. (2016). *Sistem Pengawasan*. Jakarta: Maj.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat*. De la macca.
- Handoko, D. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa.
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Buku*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. sage.
- Jones, D. W. (1975). Diana Wynne Jones."". *Detroit: Gale*, 155–168.
- Juanda, J. (2004). *Analisis karakteristik usaha warung tegal di kebayoran baru jakarta selatan dan implikasinya terhadap pemberian kredit mikro pada pt bank bni*. Institut Pertanian Bogor.